

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Rubaie. 2007. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Bayumedia. Malang.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Kerangka Otonomi Daerah. 2014. Jakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Ed Marhamah Nadir. 2018. *Senarai Penelitian Regenerasi Sektor Pertanian: SDM, Socio Agro TechnoEcology*. Deepublish. Yogyakarta.
- Farida Patittingi, Abrar Saleng, Kahar Lahae, dkk. 2021. *Pengkajian Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Mendukung Peningkatan Produksi Padi*. Litera. Yogyakarta.
- Gatot Irianto. 2016. *Lahan dan Kedaulatan Pangan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Hasni. 2008. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*. Edisi kedua. Rajawali Pers. Jakarta.
- I Khambali. 2017. *Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota*. Andi. Yogyakarta.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Ida Nurlinda. 2009. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria "Perspektif Hukum"*. Rajawali Press. Jakarta.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenamedia. Depok.

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat. 2014. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik (cetakan keempat)*. Nuansa Cendekia. Bandung.
- Lestari T. 2009. *Dampak Konversi Lahan Pertanian bagi Taraf Hidup Masyarakat*. Mandar Maju. Bandung.
- Maria SW Sumardjono. 2005. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Buku Kompas. Jakarta.
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sri Susyanti Nur. 2010. *Urgensi Bank Tanah*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Sudrajat. 2018. *Mengenal Lahan Sawah dan Memahami Multifungsinya Bagi Manusia dan Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumbangan Baja. 2012. *Perencanaan Tata Guna Lahan Dalam Pengembangan Wilayah (Pendekatan Spasial dan Aplikasinya)*. Cv. Andi Offset. Yogyakarta.
- Syahrudin Nawi. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris*. Umitoha Ukhuwah Grafika. Makassar.
- Urip Santoso. 2015. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Prenamedia Grup. Jakarta.

Jurnal:

- Isdyana Kusuma Ayu dan Benny Krestian Heriawanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan di Indonesia". Jurnal Ketahanan Pangan. Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Vol. 2. Nomor 2 2018.
- Muhammad Nur Ansari, Syamsul Bachri, Kahar Lahae. "Efektivitas Terhadap Pelaksanaan Pengaturan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan". Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. 9. Nomor 2 November 2020.

Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. "Reforma Agraria Untuk Mewujudkan Kedaulatan Pangan", Rechtidee Jurnal Hukum, Vol. 2 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo. Madura.

Website:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. Website:

<https://maroskab.bps.go.id/publication/2020/09/28/1ff355ff7fc61d4450cd62b6/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2020.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2012*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2013/01/30/fb3d772ca3161aa94784e5b9/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2012.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2013*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2013/09/26/c812d9f4d1e849bafead8bcd/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2013.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2014*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2014/09/26/d7c1a1408741278b8777bd34/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2014.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2015*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2015/11/02/eeb4a7c19d4684cc3b1e6067/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2015.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2016*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2016/07/29/d29029aab3ce09c35e866e30/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2016.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2017*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2017/09/26/bddbdc3a543b6d75649335d8/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2017.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2018*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2018/09/26/2b00c7dad2a5918babf1bbde/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2018.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2019*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2019/09/26/bc0427d11630934c0db80da7/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2019.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2020*. Website:

<http://maroskab.bps.go.id/publication/2020/09/28/1ff355ff7fc61d4450cd62b6/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2020.html>

----- *Kecamatan Moncongloe Dalam Angka 2021*. Website:
<http://maroskab.bps.go.id/publication/2021/09/24/f264b6d4228e091ba609ba3f/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2021.html>

----- *Kecamatan Moncongloe dalam Angka 2022*. Website:
<https://maroskab.bps.go.id/publication/2022/09/26/73c68af0295f9bbac56e9357/kecamatan-moncongloe-dalam-angka-2022.html>

Dokumen Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Grobogan, *Penataan Ruang dan Perlindungan Lahan Pertanian*, 2014, Grobogan. Website:
<https://bappeda.grobogan.go.id/dokumen/9-info/opini/55-penataan-ruang-dan-perlindungan-lahan-pertanian>

Nurul Hidayah. 2021. *Sejumlah Fraksi DPRD Maros Soroti Alih Fungsi Lahan Pertanian*. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2022. Website :
<https://makassar.tribunnews.com/2021/06/25/sejumlah-fraksi-dprd-maros-soroti-alih-fungsi-lahan-pertanian?page=all>

Nofie Tessar. 2020. *Maraknya Alih Fungsi Lahan Sebabkan Produksi Pertanian Menurun*. Diakses pada 16 November 2022. Website :
<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4328297/maraknya-alih-fungsi-lahan-sebabkan-produksi-pertanian-menurun>

Puspasari Setyaningrum. 2022. *Alasan Indonesia Disebut Negara Agraris, Salah Satunya Ekonomi Ditopang Oleh Petani*. Diakses pada 15 November 2022. Website:
<https://regional.kompas.com/read/2022/08/03/215851878/alasan-indonesia-disebut-negara-agraris-salah-satunya-ekonomi-ditopang-oleh?page=all>

Suhaiela Bahfein. 2020. *Luas Baku Tanah Sawah Nasional 7,46 Juta Hektar*. Diakses pada 5 November 2022. Website:
<https://properti.kompas.com/read/2020/02/04/135141121/luas-baku-tanah-sawah-nasional-746-juta-hektar>

"Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 25 Juni 2023.

Skripsi:

Akmal. 2021. *Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Eka Fitrianiingsih. 2017. *Tinjauan Terhadap Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Nonpertanian (Permukiman) di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Haryugiana. 2020. *Alih Fungsi Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Pabrik ke Kawasan Perumahan*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Wahyu Hidayat. 2016. *Implikasi Hukum Perumahan Yang Dibangun di Atas Lahan Pertanian Akibat Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032.

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Administrasi, Pusat Pemerintahan dan Batas Wilayah Kecamatan Kabupaten Maros.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi, dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 14/Kpts/SR.020/B/01/2022 tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAROS
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan DR. Ratulangi No. 48 Maros Telp (0411) 372102 email : kab-maros@atrbtn.go.id

Nomor : UP.02.01/428-73.09.100/II/2023 Maros, 22 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Maros
di-
Maros

Berdasarkan Surat Izin Penelitian Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor
77/II/IP/DPMPSTP/2023 tanggal 09 Februari 2023 perihal tersebut diatas,
bersama ini disampaikan bahwa kami menerima mahasiswa Universitas
Hasanuddin untuk melaksanakan Penelitian dengan data mahasiswa berikut:

Nama : Nur Asiah Jamilah
No. Pokok : B11116111
Tempat/Tgl Lahir : Welonge/04 Desember 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Kelurahan Laringgi, Kecamatan Marioriawa

dalam rangka Penulisan Skripsi yang dilaksanakan dari 10 Februari 2023
s.d. 10 Maret 2023 dengan judul: **"PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM
PENCEGAHAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KABUPATEN MAROS"**

Demikian disampaikan, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Maros
Plt. Kepala Subbagian Tata Usaha,

Ditandatangani secara
elektronik

Suhendra, S.H.
NIP. 19861015 200912 1 007

Tembusan:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maros, di Maros.



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.04



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl. Dr. Ratulangi No. 57 Maros Telp. (0411) 371 478 Kode Pos 90511

SURAT KETERANGAN

Nomor : 521.1/312 / B.TU / 11 / DPKP / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MUHAMMAD DANIAL, S.TP., MM**
NIP : 19680325 199803 1 005
Pangkat/ Gol. : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Sekertaris Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Maros

Memberikan Keterangan kepada :

Nama : **NUR ASIAH JAMILAH**
NIM : B11116111
Alamat : Kelurahan Laringgi, Kec. Marioriawa, Kab. Soppeng
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : "Peran Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Maros".

Telah melakukan penelitian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Maros

Pada Tanggal 21 Februari 2023

An. Kepala Dinas,
Sekretaris



Ir. MUHAMMAD DANIAL, S.TP., MM

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19680325 199803 1 005